



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI VI DPR RI: BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM,
BUMN, DAN INVESTASI**

Tahun Sidang	:	2016-2017
Masa Persidangan	:	V
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan: <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN);2. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam);3. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS Sabang);4. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Sifat Rapat	:	Terbuka
Rapat ke	:	32 (tiga puluh dua)
Hari/Tanggal	:	Selasa, 25 Juli 2017
W a k t u	:	Pukul 13.30 s.d.15.15 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI
Ketua Rapat	:	Ir. H. Teguh Juwarno, M.Si. (Ketua Komisi VI DPR RI/F-PAN) didampingi oleh: <ol style="list-style-type: none">1. Bowo Sidik Pangarso (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/F-PPG)2. Mohamad Hekal, M.B.A. (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/ F-P. Gerindra)3. Ir. H. Azam Azman Natawijana (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/F-PD)
Sekretaris Rapat	:	Wahyu Prameswari, S.H., M.Si. (Kabagset. Komisi VI DPR RI)
A c a r a	:	Membahas Penyempurnaan Perubahan Alokasi Anggaran Mitra Kerja dalam RAPBN-P TA 2017, sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR RI.
Hadir	:	<ol style="list-style-type: none">1. dari 49 Anggota Komisi VI DPR RI.2. Kepala BSN beserta jajaran;3. Kepala BP Batam beserta jajaran;4. Kepala BPKS Sabang beserta jajaran;5. Ketua KPPU beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Kepala BSN, Kepala BP Batam, Kepala BPKS Sabang, dan Ketua KPPU, dibuka pukul 13.30 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menginformasikan bahwa agenda Rapat Kerja hari Selasa, 25 Juli 2017 dalam rangka Membahas Penyempurnaan Perubahan Alokasi Anggaran Mitra Kerja Komisi VI DPR RI dalam RAPBN-P TA 2017, sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR RI dan Ketua Rapat menyampaikan RAPBN-P TA 2017 Mitra Kerja Komisi VI DPR RI hasil sinkronisasi Badan Anggaran DPR RI.
3. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para Kepala BSN, Kepala BP Batam, Kepala BPKS Sabang, dan Ketua KPPU, untuk menyampaikan tanggapan terkait RAPBN-P TA 2017 hasil sinkronisasi Badan Anggaran DPR RI.
4. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Anggota Komisi VI DPR RI untuk memberikan pendalaman dan memberi tanggapan terkait RAPBN-P TA 2017 Mitra Kerja Komisi VI DPR RI hasil sinkronisasi Badan Anggaran DPR RI tersebut.
5. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Kepala BSN, Kepala BP Batam, Kepala BPKS Sabang, dan Ketua KPPU, untuk memberikan jawaban atas pendalaman/tanggapan Anggota Komisi VI DPR RI.

II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI menyetujui anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI dalam Perubahan APBN Tahun Anggaran 2017 sesuai Surat Badan Anggaran DPR RI Nomor AG/12556/DPR RI/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-584/MK.02/2017 tanggal 21 Juli 2017, dikenakan efisiensi belanja barang sebesar Rp26.862.890.300,00 (*Dua Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah*) sehingga total alokasi anggaran menjadi sebesar Rp110.404.166.700,00 (*Seratus Sepuluh Miliar Empat Ratus Empat Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).
2. Komisi VI DPR RI menyetujui anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dalam Perubahan APBN Tahun Anggaran 2017 sesuai Surat Badan Anggaran DPR RI Nomor AG/12556/DPR RI/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-584/MK.02/2017 tanggal 21 Juli 2017, tidak ada perubahan alokasi anggaran atau tetap sebesar Rp1.750.805.429.000,00 (*Satu Triliun Tujuh Ratus Lima Puluh Miliar Delapan Ratus Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).
3. Komisi VI DPR RI menyetujui anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) dalam Perubahan APBN Tahun Anggaran 2017 sesuai Surat Badan Anggaran DPR RI Nomor AG/12556/DPR RI/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-584/MK.02/2017 tanggal 21 Juli 2017, tidak ada perubahan alokasi anggaran

atau tetap sebesar Rp249.655.176.000,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah*).

4. Komisi VI DPR RI menyetujui anggaran Badan Standardisasi Nasional RI dalam Perubahan APBN Tahun Anggaran 2017 sesuai Surat Badan Anggaran DPR RI Nomor AG/12556/DPR RI/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-584/MK.02/2017 tanggal 21 Juli 2017, dikenakan efisiensi belanja barang sebesar Rp20.000.000.000,00 (*Dua Puluh Miliar Rupiah*) sehingga total alokasi anggaran menjadi sebesar Rp164.522.097.000,00 (*Seratus Enam Puluh Empat Milyar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).

Catatan:

Fraksi Partai Gerindra DPR RI tidak memberikan pendapat terhadap keputusan mengenai anggaran Kementerian/Lembaga dalam dalam Perubahan APBN Tahun Anggaran 2017 sesuai Surat Badan Anggaran DPR RI Nomor AG/12556/DPR RI/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-584/MK.02/2017 tanggal 21 Juli 2017.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 15.15 WIB.